



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FAISAL SYAHRUL
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 495262

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.671.483.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/234 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 586.718.500
2. Tanah Seluas 3436 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 171.800.000
3. Tanah Seluas 1489 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.565.000
4. Tanah Seluas 8570 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 171.400.000
5. Bangunan Seluas 320 m2 di KAB / KOTA ENREKANG, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **161.750.000**

1. MOBIL, KIJANG INNOVA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, SCOOPY SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HADIAH Rp. 7.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA OLAH RAGA - Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	420.961.168
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.259.194.668
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.259.194.668

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.